

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI  
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN  
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**DIAH SULISTYOWATI**

**NIM. C2C607046**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2011**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Diah Sulistyowati  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607046  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PAJAK DAERAH,  
RETRIBUSI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM, DAN DANA  
ALOKASI KHUSUS TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL**

Dosen Pembimbing : Drs. Dul Muid, M.Si., Akt

Semarang, 16 Februari 2011

Dosen Pembimbing,

(Drs. Dul Muid, M.Si., Akt)

NIP. 196505131994031002

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Diah Sulistyowati

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607046

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah,  
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi  
Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Februari 2011**

Tim Penguji

1. Drs. Dul Muid, M.Si., Akt (.....)
2. Warsito Kawedar, SE., M.Si., Akt (.....)
3. Herry Laksito, SE., M.Adv. Acc., Akt (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Diah Sulistyowati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 16 Februari 2011

Yang membuat pernyataan,

(Diah Sulistyowati)

NIM : C2C607046

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Belanja modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud dari *good governance*.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kab/Kota di Jawa dan Bali yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007 hingga tahun 2010 kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 168 Kab/Kota. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, *good governance*, Laporan Realisasi APBD

## **ABSTRACT**

*This research is aimed to analyze the influence of Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund toward the Allocation of Capital Expenditure. Capital expenditure has important role in operating government system that is to increase public prosperity and as a form of good governance.*

*The samples which are use in this research are regency/municipality of Java and Bali that report routine the realization report of the estimate income of regional expense (APBD) from 2007 until 2010 for Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Based on that criteria, samples which are use in this research are 168 regencies/municipalities. The instrument that use is multiple regression.*

*The result of this research shows that regional taxes, regional retribution, and general allocation fund has positive influence toward the allocation of capital expenditure. Besides specific allocation fund has negative influence toward the allocation of capital expenditure.*

*Password : Regional Taxes, Regional Retribution, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Capital Expenditure, Good Governance, the realization report of the Estimate Income of Regional Expense (APBD)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Drs. Dul Muid, M.Si., Akt selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta telah memberikan banyak masukan kepada saya.
3. Dr. H.Abdul Rohman, SE., M.Si., Akt, selaku dosen wali
4. Kedua orang tua saya (Pudji Rahardjo, Bsc dan Wartini) yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik bagi putri-putrinya. Terima kasih atas semua pengorbanan Bapak dan Ibu untuk saya. Saya sayang Bapak dan Ibu.

5. Kakak satu-satunya (Indah Sulistyorini, SE) yang telah memberikan informasi-informasi mengenai skripsi dan telah banyak mentraktir makanan yang bergizi kepada saya agar tidak sakit saat mengerjakan skripsi.
6. Saudara-saudara tercinta di Kost Asoy, Nabila, Kristin, Uly, Mb Elok, Lala, Jamal, Dwi, Nike dan Mb Neneng, yang telah menjadi keluarga baru bagi saya, orang-orang yang sangat dekat dengan saya selama kurang lebih 3,5 tahun di Semarang. Terima kasih atas dukungan kalian.
7. Mas Ai sebagai orang yang selalu mendukung dan mengajarkan kesabaran kepada saya serta selalu mengingatkan saya untuk berdoa. Terima kasih atas segalanya.
8. Sahabat-sahabat NERO yang selama 3 tahun ini selalu sama-sama, Anisa, Tika, Metta, Nabila dan Nike, yang telah saling berbagi dukungan, cerita, ilmu, dan pengalaman. Semoga kita bisa selalu kompak.
9. Maritza Ellyandra Puspitasari dan Ruzanna Amanina sebagai teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi dan persiapan sidang. Terima kasih atas informasi dan masukan-masukannya.
10. Teman-teman jurusan Akuntansi kelas B angkatan 2007 yang telah menjadi teman sekelas selama 3,5 tahun ini. Sukses selalu.
11. Teman-teman KKN Peterongan, Ardian, Ade, Mas Adit, Archi, Pak Bondan, Dita, Rico, Nener, Mas Dimas, Gulis, Jenk Dina, Mas Arif, Arum, Andre, dan Desi yang telah menjadi keluarga dadakan selama 1 bulan yang menyenangkan di Posko Peterongan.



12. Mas Imam sebagai orang TU yang selalu membantu saya dan memberikan nasihat-nasihat selama menjalankan perkuliahan dan mempersiapkan sidang. Terima kasih banyak.
13. Teman SMA saya, Diah Priestik yang telah mengajarkan bahasa inggris sehingga pembuatan abstrak versi bahasa inggris dapat berjalan dengan lancar.
14. Perpustakaan FE UNDIP yang telah menyediakan semua materi-materi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya.

Semarang, 16 Februari 2011

Penulis

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

“Jangan mengeluh atas apa yang tidak kita miliki, tetapi bersyukurlah atas apa yang kita miliki”

“Jangan ragu untuk memilih jalan yang lain apabila jalan yang kita pilih sekarang membuat kita berhenti di tempat”

“Seseorang merasakan kebahagiaan tertinggi ketika tahu dirinya dicintai (Victor Hugo)”

“Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu (Andrea Hirata)”

“Selalu mengingat Allah diatas segala-galanya”

Karya ini dipersembahkan untuk :

- Kedua orangtua
- Kakak
- Orang-orang terdekat

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Anggaran Daerah Berbasis Kinerja.....	11
2.1.2. Proses Penyusunan APBD .....	13
2.1.3. Hubungan Keagenan Dalam Penganggaran Sektor Publik .....	13
2.1.3.1. Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Eksekutif.....	14
2.1.3.2. Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik .....	15

2.2.	Penelitian Terdahulu .....	15
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	18
2.4.	Hipotesis.....	19
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	23
3.1.1.	Belanja Modal .....	23
3.1.2.	Pajak Daerah .....	24
3.1.3.	Retribusi Daerah.....	24
3.1.4.	Dana Alokasi Umum.....	25
3.1.5.	Dana Alokasi Khusus .....	26
3.2.	Populasi dan Penentuan Sampel.....	26
3.3.	Jenis dan Sumber Data .....	27
3.4.	Metode Pengumpulan Data .....	28
3.5.	Metode Analisis .....	28
3.5.1.	Statistik Deskriptif.....	28
3.5.2.	Pengujian Asumsi Klasik .....	28
3.5.2.1.	Uji Normalitas.....	29
3.5.2.2.	Uji Multikolonieritas.....	30
3.5.2.3.	Uji Autokorelasi.....	31
3.5.2.4.	Uji Heteroskedastisitas.....	32
3.5.3.	Metode Regresi Linier Berganda .....	32
3.5.4.	Pengujian Hipotesis.....	33
3.5.4.1.	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	33
3.5.4.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)..	34
3.5.4.3.	Koefisien Determinasi.....	34
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>36</b>
4.1.	Diskripsi Objek Penelitian .....	36
4.2.	Analisis Data .....	37
4.2.1.	<i>Descriptive Statistic</i> (Statistik Deskriptif) Variabel Independen .....	37

4.2.2.	<i>Descriptive Statistic</i> (Statistik Deskriptif) Variabel Dependen.....	40
4.2.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	41
4.2.3.1.	Hasil Uji Normalitas .....	41
4.2.3.2.	Hasil Uji Multikolonieritas .....	44
4.2.3.3.	Hasil Uji Autokorelasi.....	46
4.2.3.4.	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	47
4.2.4.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	48
4.2.4.1.	Koefisien Determinasi.....	48
4.2.4.2.	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f).....	49
4.2.4.3.	Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	50
4.2.5.	Hasil Uji Hipotesis .....	52
4.3.	Interpretasi Hasil .....	55
4.3.1.	Hubungan Pajak Daerah dengan alokasi Belanja Modal .....	55
4.3.2.	Hubungan Retribusi Daerah dengan alokasi Belanja Modal .....	56
4.3.3.	Hubungan Dana Alokasi Umum dengan alokasi Belanja Modal .....	57
4.3.4.	Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan alokasi Belanja Modal .....	58
BAB V	PENUTUP .....	61
5.1.	Kesimpulan .....	61
5.2.	Keterbatasan.....	62
5.3.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	.....	66

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010 .....	5
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Autokorelasi.....	31
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Independen.....	38
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen .....	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas : Kolmogorov-Sminov .....	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas .....	45
Tabel 4.5 Pengambilan Keputusan Autokorelasi.....	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi : Durbin-Watson .....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji f.....	50
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	51
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Hipotesis .....	53
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	55

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal .....	19
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas : Histogram.....	42
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas : Grafik Normal Probably Plot .....	43
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	
Laporan Realisasi Pajak Daerah Kab/Kota di Jawa dan Bali (dalam jutaan rupiah).....	66
Lampiran 2	
Laporan Realisasi Retribusi Daerah Kab/Kota di Jawa dan Bali (dalam jutaan rupiah) .....	68
Lampiran 3	
Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Jawa dan Bali (dalam jutaan rupiah) .....	70
Lampiran 4	
Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kab/Kota di Jawa dan Bali (dalam jutaan rupiah) .....	72
Lampiran 5	
Laporan Realisasi Belanja Modal Kab/Kota di Jawa dan Bali (dalam jutaan rupiah) .....	74
Lampiran 6	
Data Diolah.....	76
Lampiran 7	
Output SPSS 16.0 .....	83



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.

Dalam Khusaini (2006), asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999 mencakup paling tidak 4 hal yaitu:

1. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

2. Otonomi yang nyata, artinya daerah punya keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.
4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu (a) kewenangan lintas kabupaten/kota; (b) kewenangan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (c) kewenangan lainnya menurut PP No.25 tahun 2000.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu (Ghozali, 1993). Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran

merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Bali pada tahun 2010 berikut ini:

**Tabel 1.1.**  
**Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Bali**  
**Tahun 2010 (dalam jutaan rupiah)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>Belanja operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Total Belanja</b>	<b>% Belanja Modal</b>	<b>% Belanja Operasi</b>
Kab. Badung	916.673	127.376	1.323.217	10%	69%
Kab. Bangli	374.406	50.439	472.198	11%	79%
Kab. Gianyar	515.657	103.705	666.231	16%	77%
Kab. Jembrana	366.655	64.295	469.377	14%	78%
Kab. Klungkung	383.490	40.537	453.759	9%	85%
Kab. Tabanan	604.769	30.023	696.921	4%	87%
Kota Denpasar	712.457	45.887	819.371	6%	87%

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa persentase belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Daerah sangat kecil dibandingkan persentase

belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Daerah. Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah

mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2008). DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise, 2008). Dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah

Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal).

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (Darise, 2008). Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya *good governance*.

Menurut *World Bank*, *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktivitas pendanaan, dimana pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk pengalokasian dana investasi dalam sistem pemerintahan adalah belanja modal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data yang akan diteliti adalah laporan realisasi APBD tahun 2007 hingga 2010 dari Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Pemilihan periode waktu tersebut karena dengan menggunakan data 4 tahun terakhir dari penyusunan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja

modal saat ini. Pemilihan Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali karena Jawa dan Bali merupakan pulau yang memiliki mobilitas tinggi dalam hal belanja modal dibandingkan pulau lain di Indonesia.

Selain itu, dalam penelitian ini menambah variabel baru dan menjabarkan variabel yang pada penelitian sebelumnya kurang terperinci yaitu retribusi daerah, pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai variabel terikat. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiwit Agustina menggunakan data tahun 2001 hingga 2007 dan menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana transfer. Hasil yang diperoleh adalah PDRB tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, PAD dan dana transfer berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Lembaga Penelitian SMERU pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa kebanyakan Pemda menggunakan sebagian besar DAU untuk membiayai belanja birokrasi, sementara sebagai sumber utama belanja modal, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemda mengandalkan DAK. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya *research gap* tersebut, dan untuk memberikan hasil atas variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi pengalokasian belanja modal.

Dengan lebih memperinci variabel penelitian sebelumnya yaitu memperinci variabel PAD menjadi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperinci variabel dana transfer menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK), disertai dengan penggunaan data terbaru, peneliti ingin mengetahui apakah variabel baru tersebut akan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan apakah hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya atau bahkan memberikan hasil yang baru.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD dan pelaksanaannya lebih banyak mengalokasikan anggaran ke sektor belanja operasi daripada belanja modal. Padahal belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah yang sangat efektif untuk meningkatkan pelayanan umum. Untuk meningkatkan pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal diperlukan pengetahuan mengenai komponen-komponen pendapatan apa saja yang berpengaruh positif untuk dialokasikan ke belanja modal.

Dari sektor PAD, pajak daerah dan retribusi daerah dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Dari sektor dana perimbangan, yang dimungkinkan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal adalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?



4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap alokasi belanja modal
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap alokasi belanja modal
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja modal

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk melengkapi penelitian serupa yang telah dilakukan terdahulu serta membuktikan apakah dengan variabel yang lebih spesifik akan tetap mendukung hasil dari penelitian sebelumnya atau bahkan dapat memberikan hasil yang berbeda.
2. Dapat digunakan oleh Pemerintah Kab/Kota di Jawa dan Bali sebagai bahan pertimbangan untuk pengalokasian belanja modal, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 bagian. Uraianya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, kerangka pemikiran dan hipotesis.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III akan membahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data serta metode analisis.

##### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Pada bab ini akan memperlihatkan deskripsi statistik objek penelitian, hasil analisis, dan pembahasan

##### **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini dan saran untuk peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Anggaran Daerah Berbasis Kinerja**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2004). Dalam Ghozali (2008), anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan defisit atau surplus. Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah akan disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Anggaran daerah merupakan instrumen yang dapat menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Rohman, 2009). Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah atau sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Menurut Warsito Kawedar dkk (2008), dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran

tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Hal ini disebut dengan anggaran berbasis kinerja (ABK). Dalam Warsito Kawedar (2008) disebutkan bahwa penyusunan APBD harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Jadi ABK dalam pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu Pemerintah Daerah merencanakan terlebih dahulu program yang akan dijalankan, kemudian menganggarkan semua belanja yang dibutuhkan, dan terakhir merencanakan penerimaan untuk dapat menjalankan program tersebut.

Dalam Mardiasmo (2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Anggaran operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.

2. Anggaran modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

### **2.1.2. Proses Penyusunan APBD**

Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. Kemudian Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah PPAS telah disetujui DPRD, maka disusunlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

### **2.1.3. Hubungan Keagenan Dalam Penganggaran Sektor Publik**

Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara 2 pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal.

Menurut Lane (2003a) dalam Halim (2006), teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Menurut Andvig et al. (2001) dalam Halim (2008), *principal-agent model* merupakan kerangka analitik yang sangat berguna

dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja. Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah. Jadi tujuan prinsipal harus mengiringi tujuan untuk mengembangkan suatu daerah dan untuk membuat rakyatnya sejahtera.

Teori keagenan dalam sektor publik merupakan sistem keagenan yang bertingkat. Bertingkat yang dimaksudkan disini adalah karena hubungan keagenan dalam pemerintahan terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

#### **2.1.3.1. Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Eksekutif**

Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemda) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. APBD tersebut yang akan menjadi alat kontrol bagi DPRD untuk memantau kinerja Pemda.

### **2.1.3.2. Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik**

Dalam hal memberikan pelayanan kepada publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik (rakyat) bertindak sebagai prinsipal. Legislatif merupakan perwakilan dari rakyat yang dipercaya untuk dapat menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya. Legislatif bertindak berdasarkan keinginan rakyat dan rakyat memantau kinerja dari legislatif. Jadi walaupun di satu sisi legislatif menjadi prinsipal, tapi dalam hubungannya dengan publik, legislatif bertindak sebagai agen. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, kemudian melakukan pendelegasian tugas kepada eksekutif untuk melakukan penganggaran.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya mengenai pengalokasian belanja modal, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dari tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) meneliti tentang Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se-Jawa Bali. Hasil penelitian yang diperoleh adalah DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita, belanja modal berpengaruh positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD, PAD berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Vidi Yudha Prawira (2009) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengelolaan anggaran belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor fundamental yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap anggaran belanja modal dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Selain itu, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Wiwit Agustina (2009) meneliti pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PDRB tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, PAD dan dana transfer berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal.



Agave Sianturi (2010) meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah LRA tahun 2005 sampai 2008 dengan sampel Kab/Kota di Sumatera Utara. Hasil yang diperoleh adalah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Sampel	Metode Statistik	Hasil Penelitian
1	Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007)	Variabel dependen : Belanja Modal  Variabel independen: a. Pertumbuhan Ekonomi b. PAD c. DAU	Kab/Kota Jawa-Bali tahun 2004-2005	Analisis Regresi Linier Berganda	Hanya variabel PAD dan DAU yang berpengaruh positif terhadap belanja modal
2	David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007)	Variabel dependen : Pendapatan Per kapita  Variabel independen: a. DAU  Variabel intervening: Belanja Modal, PAD	Kab/Kota Jawa-Bali tahun 2001-2004	Analisis Diskriptif dan Analisis Jalur	DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Per Kapita. PAD berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD

3	Vidi Yudha Prawira (2009)	Variabel dependen: Belanja Modal  Variabel independen: a. Pertumbuhan ekonomi b. PAD c. DAU	Kab/Kota Jawa Tengah	Analisis Regresi Linier Berganda	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
4	Wiwit Agustina (2009)	Variabel dependen: Belanja Modal  Variabel independen : a. PDRB b. PAD c. Dana Transfer	Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2007	Analisis Regresi Linier Berganda	PAD dan Dana Transfer berpengaruh positif terhadap belanja modal. PDRB tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.
5	Agave Sianturi (2010)	Variabel dependen: Belanja Modal  Variabel independen: a. Pajak daerah b. Retribusi daerah	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2008	Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

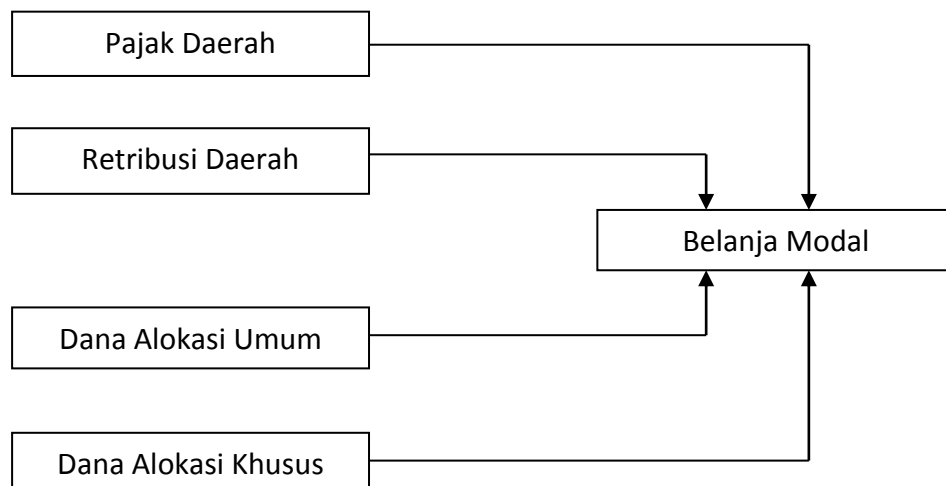
### 2.3. Kerangka Pemikiran

Belanja daerah yang seringkali lebih diperhatikan adalah pengalokasian terhadap belanja operasi. Padahal untuk pengalokasian belanja modal merupakan hal yang penting karena belanja modal pemerintah daerah difokuskan untuk menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Variabel-variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya adalah dari sektor pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Alasan pengambilan 2 variabel ini adalah karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 variabel yang sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan yang didapatkan daerah. Sedangkan dari sektor dana perimbangan, variabel yang berpengaruh adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal**



#### 2.4. Hipotesis

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah.

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Menurut Sianturi (2009), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam

Hariato (2007) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Non-Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal. Penelitian Holtz-Eakin et. Al. (1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah.

Meskipun otonomi daerah telah diberlakukan sejak lama, namun kenyataannya masih terdapat beberapa Kab/Kota yang masih menggantungkan sumber pendanaan pemerintahannya pada dana perimbangan (dana transfer dari Pemerintah Pusat). Misalnya Kab Cilacap pada tahun 2009 mempunyai PAD Rp 100.784.000.000,00 dan DAU sebesar Rp 782.157.000.000,00. Berdasarkan nilai tersebut dapat dilihat bahwa Kab Cilacap mempunyai nilai DAU yang lebih besar daripada PAD, ini berarti Kab. Cilacap masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Besarnya nilai DAU dipastikan akan menambah jumlah pendapatan Pemerintah Daerah. Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah dana lokasi khusus. Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Lembaga penelitian SMERU (2008), mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal, sedangkan variabel independennya adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas digunakan model persamaan regresi berganda.

Berikut ini pembahasan definisi operasional yang menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **3.1.1. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD.

Kategori belanja modal menurut Ghozali (2008) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

### **3.1.2. Pajak Daerah**

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

### **3.1.3. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi 3, yaitu:

a. **Retribusi jasa umum**

Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang



pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

b. Retribusi jasa usaha

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang umumnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi perijinan tertentu

Perizinan yang termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi serta benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

#### **3.1.4. Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Halim (2004), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

### **3.1.5. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Menurut Poesoro (2008), penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

### **3.2. Populasi dan Penentuan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah Kab/Kota di Jawa dan Bali. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive*

*sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali yang telah memasukkan data Laporan Realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2007 hingga 2010.
- Kabupaten/Kota melaporkan anggaran dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang digunakan sebagai bahan penelitian ini.

Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kriteria untuk dipergunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Jawa : 39 Kab/Kota
- Bali : 3 Kab/Kota

Berdasarkan informasi tersebut, maka data dalam penelitian ini adalah sebanyak 168 daerah. Perhitungan tersebut diperoleh dari :

N daerah : 42 Kab/Kota

N tahun : 4 tahun

N total :  $42 \times 4 = 168$

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Data

tersebut berupa Laporan Realisasi APBD yang memuat pula data belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah, dana lokasi umum, dan dana alokasi khusus.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode sensus yang mengambil 168 Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.

### **3.5. Metode Analisis**

#### **3.5.1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

#### **3.5.2. Pengujian Asumsi Klasik**

Penelitian ini menggunakan pengujian regresi linier berganda. Dalam Darwanto (2007), regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung

multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik terdiri dari:

### **3.5.2.1. Uji Normalitas**

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal berarti data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Distribusi normal data dengan bentuk distribusi normal dimana data memusat pada nilai rata-rata dan median (Purbayu, 2005).

Dalam Purbayu (2005), disebutkan bahwa untuk mengetahui bentuk distribusi data dapat menggunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Dalam penelitian ini menggunakan kedua cara tersebut. Analisis statistik merupakan cara yang dianggap lebih valid dengan menggunakan keruncingan kurva untuk mengetahui bentuk distribusi data. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

Sedangkan grafik distribusi merupakan cara sederhana yang dapat mendukung analisis statistik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal dimana grafiknya mengikuti garis diagonal.

Jika data telah terdistribusi secara normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### 3.5.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Multikolonieritas terjadi dalam analisis regresi berganda apabila antarvariabel independen saling berkorelasi.

Dalam Ghozali (2006) multikolonieritas dapat dilihat dari :

- Nilai *tolerance* dan lawannya
- *Variance Inflation Factor* (VIF)

Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance*  $< 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2006). Apabila terjadi gejala multikolonieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa dipilih model yang baik (Purbayu, 2005).

### 3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series*, sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2006).

Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (*DW test*). *DW Test* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variable lag diantara variabel independen (Ghozali, 2006). Singgih (2000), bila angka DW diantara  $-2$  samapai  $+2$ , berarti tidak terjadi autokorelasi.

Menurut Purbayu (2005), aturan pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengambilan keputusan autokorelasi**

<b>Jika</b>	<b>Keputusan</b>
$d < d_l$	Terjadi masalah autokorelasi yang positif dan perlu perbaikan
$d_l < d < d_u$	Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik
$d_u < d < 4 - d_u$	Tidak ada masalah autokorelasi
$4 - d_u < d < 4 - d_l$	Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik
$4 - d_l < d$	Masalah autokorelasi serius

#### 3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2006).

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu , maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

#### 3.5.3. Metode Regresi Linier Berganda

Penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan 1 variabel dependen



(belanja modal), sehingga menggunakan persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

#### 3.5.4. Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fitnya*. Secara statistik, hal tersebut dapat diukur dengan nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Ghozali, 2006).

##### 3.5.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Cara melakukan uji t adalah dengan *Quick Look* yaitu bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5 persen, maka  $H_0$  yang menyatakan  $b_i=0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai *absolute*). Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006).

#### **3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)**

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2006). Uji f dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

#### **3.5.4.3. Koefisien Determinasi**

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2006). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Secara umum, koefisien

determinasi untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.